

6.01.000012

## Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Ewalidata

<b>Kode</b>	6.01.000012
<b>Produsen Data</b>	INSPEKTORAT
<b>Bidang Urusan</b>	PENGAWAS
<b>Sifat Data</b>	Ewalidata
<b>Satuan</b>	Perangkat Daerah
<b>Tgl. Input Data</b>	20 January 2025
<b>Tgl. Diperbaharui</b>	18 May 2026

### DEFINISI & METODOLOGI

#### Konsep

Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan dan administrasi publik dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Pendampingan merujuk pada proses memberikan dukungan langsung dan bimbingan kepada perangkat daerah lainnya atau unit pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan lebih efektif. Sementara itu, asistensi lebih merujuk pada pemberian bantuan teknis, penyuluhan, atau penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

#### Definisi

Pendampingan adalah upaya untuk memberikan bimbingan langsung kepada perangkat daerah yang membutuhkan dukungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pendampingan ini dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam urusan tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah. Asistensi adalah pemberian bantuan teknis atau administrasi yang lebih praktis dan operasional, misalnya dalam bentuk pelatihan, penyediaan informasi atau alat bantu, dan penyusunan dokumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan.

#### Cara Interpretasi

Pendampingan dan asistensi berfokus pada membantu pemerintah daerah untuk memahami dan mematuhi regulasi yang ada, baik dalam hal peraturan anggaran, administrasi, maupun kebijakan lainnya

#### Metode Pengumpulan

Kualitatif dan atau kuantitatif

#### Ukuran / Rumus

Efektif dan efisien

#### Catatan Lainnya

1

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	—	—	—	—	—	—	—